



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024-2026

DINAS KESEHATAN
KOTA PANGKALPINANG



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2024 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada periode ini maupun periode berikutnya.

Pangkalpinang, Maret 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PANGKALPINANG,



Dr. dr. H. Masagus Hakim, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19720828 200212 1 005

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang	11
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang	28
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang	41
2.4 Tantangan	56
2.5 Peluang	56
2.6 Kelemahan	56
2.7 Kekuatan	57
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	58
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	58
3.2 Telaah Tujuan, Sasaran dan Rencana Pembangunan Daerah	59
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah	66
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	76
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	76
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN	78
Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	83
5.1 Strategi	83
5.2 Arah Kebijakan	83

Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	85
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	95
Bab VIII	PENUTUP	100
8.1	Pedoman Transisi	100
8.2	Kaidah Pelaksanaan	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Dokumen Renstra OPD dengan Dokumen Lainnya	3
Gambar 1.2	Bagan Struktur Organisasi Sumder Daya Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	28
Tabel 2.2	Data PNS Berdasarkan Pendidikan Pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2022	29
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pendidikan Pada RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Tahun 2022...	29
Tabel 2.4	Data PNS Berdasarkan Pendidikan Pada RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Tahun 2022	29
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada PJK Kota Pangkalpinang Tahun 2022	30
Tabel 2.6	Data PNS Berdasarkan Pendidikan Pada PJK Kota Pangkalpinang Tahun 2022	30
Tabel 2.7	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Labkesda Kota Pangkalpinang Tahun 2022	31
Tabel 2.8	Data PNS Berdasarkan Pendidikan Pada Labkesda Kota Pangkalpinang Tahun 2022	31
Tabel 2.9	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Puskesmas Air Itam Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	32
Tabel 2.10	Data PNS Berdasarkan Pendidikan Pada Puskesmas Air Itam Kota Pangkalpinang Tahun 2022	32
Tabel 2.11	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Puskesmas Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2022	32
Tabel 2.12	Data PNS Berdasarkan Pendidikan Pada Puskesmas Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2022	33
Tabel 2.13	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Puskesmas Melintang Kota Pangkalpinang Tahun 2022	33
Tabel 2.14	Data PNS Berdasarkan Pendidikan Pada Puskesmas Melintang Kota Pangkalpinang Tahun 2022	34
Tabel 2.15	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	34

Tabel 2.16	Data PNS Berdasarkan Pendidikan Pada Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang Tahun 2022	34
Tabel 2.17	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Puskesmas Pasir Putih Kota Pangkalpinang Tahun 2022	35
Tabel 2.18	Data PNS Berdasarkan Pendidikan Pada Puskesmas Pasir Putih Kota Pangkalpinang Tahun 2022	35
Tabel 2.19	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Puskesmas Girimaya Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	36
Tabel 2.20	Data PNS Berdasarkan Pendidikan Pada Puskesmas Girimaya Kota Pangkalpinang Tahun 2022	36
Tabel 2.21	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Puskesmas Selindung Kota Pangkalpinang Tahun 2022	37
Tabel 2.22	Data PNS Berdasarkan Pendidikan Pada Puskesmas Selindung Kota Pangkalpinang Tahun 2022	37
Tabel 2.23	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Puskesmas Taman Sari Kota Pangkalpinang Tahun 2022	37
Tabel 2.24	Data PNS Berdasarkan Pendidikan Pada Puskesmas Taman Sari Kota Pangkalpinang Tahun 2022	38
Tabel 2.25	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Puskesmas Kacang Pedang Kota Pangkalpinang Tahun 2022	38
Tabel 2.26	Data PNS Berdasarkan Pendidikan Pada Puskesmas Kacang Pedang Kota Pangkalpinang Tahun 2022	38
Tabel 2.27	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2022	39
Tabel 2.28	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2022	40
Tabel 2.29	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021-2022	42
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan Terhadap Pencapaian Tujuan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah	60
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian	

	Kesehatan RI Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	68
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dalam Rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026	79
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang	80
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026	82
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang	84
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	94
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

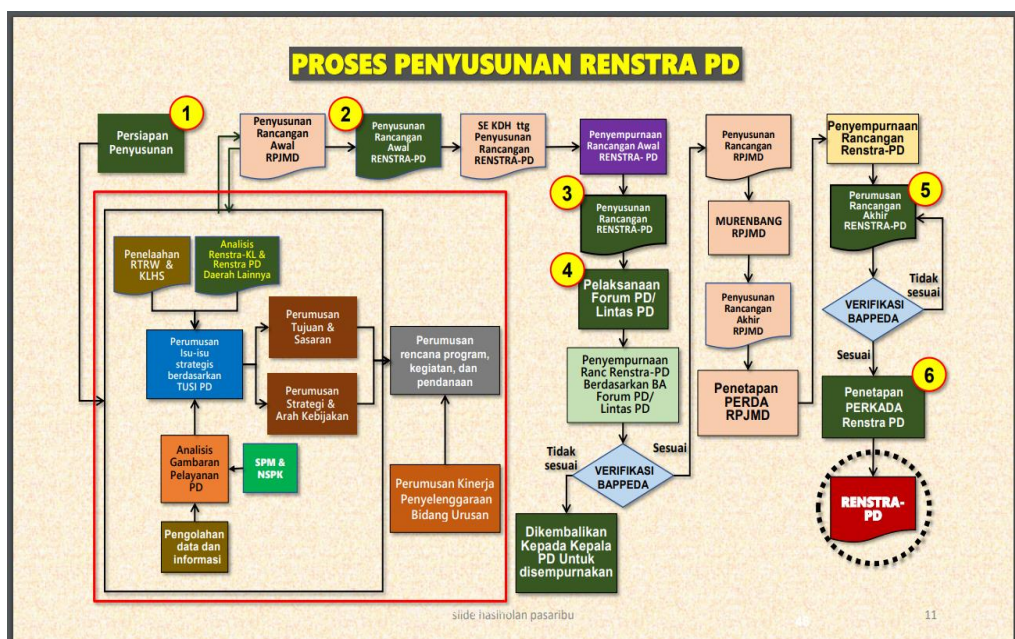
Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra). Renstra OPD adalah Dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) Tahun. Secara lebih jelas bahwa Rencana Strategis itu sendiri merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 kemudian selanjutnya Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang melakukan penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dengan berpedoman kepada dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Selanjutnya, RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun selama periode tersebut.

Gambar 1.1
Hubungan Dokumen Renstra OPD dengan Dokumen lainnya



1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
20. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kota Pangkalpinang;
21. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023).

22. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tiga tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian RPD Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang adalah :

1. Menjadi acuan resmi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun, mensinkronkan dan mengoptimalkan pencapaian RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja, serta perencanaan penganggaran Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang;
3. Memberikan pedoman kepada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang berserta seluruh UPTD Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu fasilitasi, koordinasi, dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kota Pangkalpinang;
4. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif;
5. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur;
6. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang guna menunjang pencapaian target kinerja terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, meliputi :

Bab I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan tentang : Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang berisikan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Bappeda kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan pada tiga tahun mendatang.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang beserta faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang yang terkait dengan pencapaian

tujuan dan sasaran RPD dalam periode tahun 2024-2026. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kesehatan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran dan tujuan RPD. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang

3.3 Telaahan RENSTRA K/L, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi, Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA K/L ataupun RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Pada bagian ini mengemukakan faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang ditinjau dari implikasi RTRW.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Pada bagian ini mengemukakan apa saja yang menjadi isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang berdasarkan permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan tentang strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menjelaskan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang.

Bab VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang

Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kota Pangkalpinang sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 134

Dinas Kesehatan Tipe B merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Kepala Dinas

Pasal 135

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan;
 - b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Wali kota;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Kesehatan;

- d. penetapan rencana kerja dinas Kesehatan, menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesehatan;
 - f. pelaksanaan perencanaan bidang Kesehatan;
 - g. pengkoordinasian dan pelaksanaan Kesehatan di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan membawahi:
- a. Sekretaris;
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Bagan struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Sekretaris

Pasal 136

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Kesehatan;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Kesehatan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Kesehatan;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian PEP dan Keuangan.

Pasal 137

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Kesehatan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai;
- d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Kesehatan;
- e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Kesehatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan.

Pasal 138

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan rencana program

dan evaluasi dan pelaporan, melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Kesehatan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, RKA/DPA Kesekretariatan) Dinas Kesehatan;
 - b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Kesehatan;
 - c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Dinas Kesehatan;
 - d. pelaksanaan analisis keuangan Dinas Kesehatan;
 - e. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Kesehatan;
 - f. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas Kesehatan; dan
 - g. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Kesehatan.

Paragraf 4

Kepala Bidang dan Kepala Seksi

Pasal 139

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Kesehatan Masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator meliputi:
 - a. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

- (1) Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (2) Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Kesehatan Keluarga dan Gizi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
 - e. pelaporan di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi.

Pasal 141

- (1) Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (2) Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 142

- (1) Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (2) Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olahraga;

- b. penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan
- e. pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Pasal 143

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilan dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilan dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian

- penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilan dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilan dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator meliputi:
- a. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Pasal 144

- (1) Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Surveilans dan Imunisasi;
- b. penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Surveilans dan Imunisasi;
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Surveilans dan Imunisasi;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Surveilans dan Imunisasi; dan
- e. pelaksanaan Surveilans dan Imunisasi; dan
- f. pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi.

Pasal 145

- (1) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - b. penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- e. pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

Pasal 146

- (1) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - b. penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi

- pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; dan
- e. pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Pasal 147

- (1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan

- PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator meliputi:
- a. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan;
 - b. Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
 - c. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 148

- (1) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pelayanan Kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan

- kebijakan Pelayanan Kesehatan;
- b. penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan;
 - c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan;
 - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan; dan
 - e. pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 149

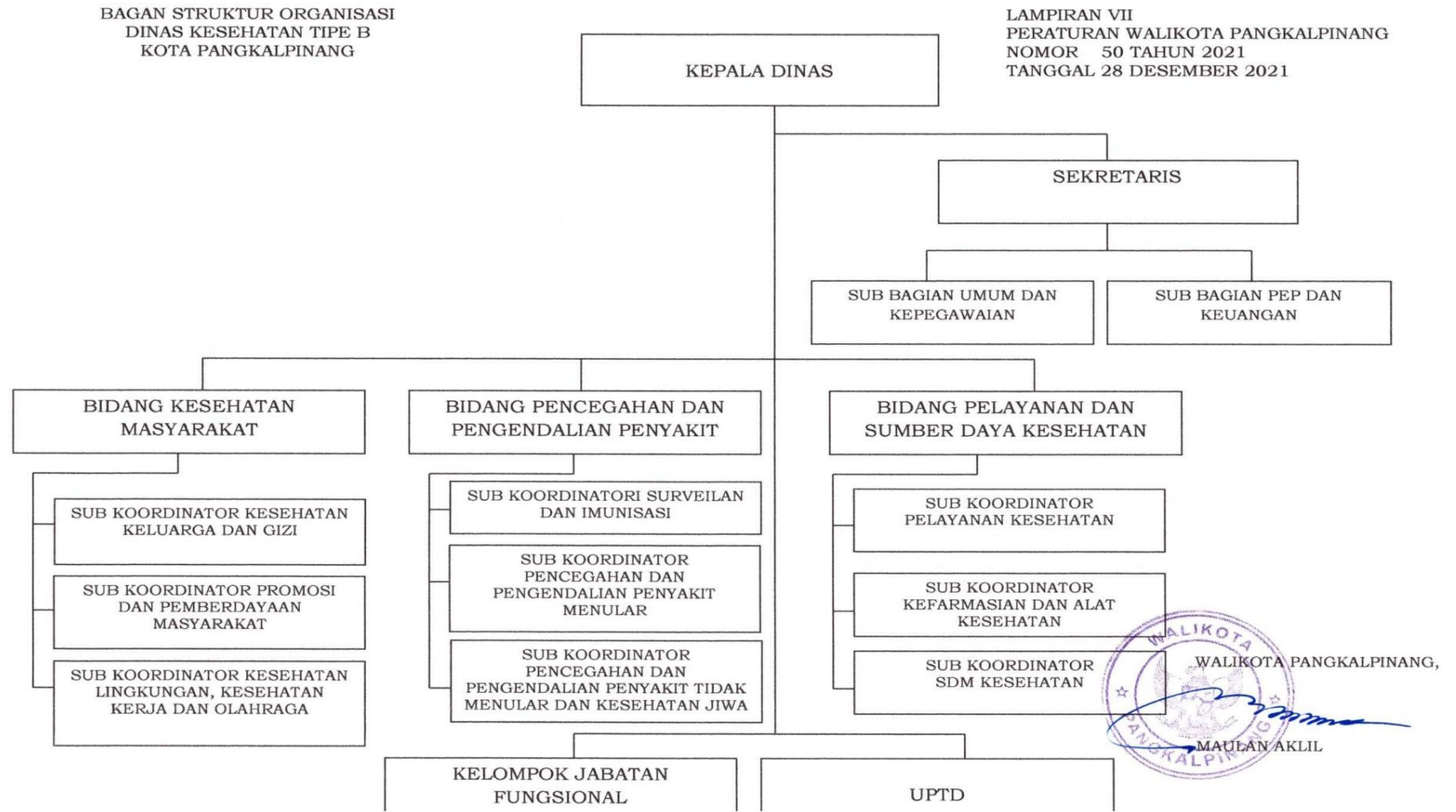
- (1) Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Gudang Farmasi;
 - b. penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Gudang Farmasi;
 - c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Gudang Farmasi;
 - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan

- e. pelaporan di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Gudang Farmasi.

Pasal 150

- (1) Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - b. penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
 - e. pelaporan di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang



2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang

Dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang didukung dengan sumberdaya yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia, berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal merupakan aparatur pemerintah yang meliputi Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang serta staf yang melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dan Seluruh UPTD. Dinas Kesehatan memiliki 12 UPTD yang terdiri dari;
 1. UPTD. Rumah Sakit Umum Depati Hamzah
 2. UPTD. Laboratorium Kesehatan
 3. UPTD. Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
 4. UPTD. Puskesmas Selindung
 5. UPTD. Puskesmas Pangkalbalam
 6. UPTD. Puskesmas Taman Sari
 7. UPTD. Puskesmas Kacang Pedang
 8. UPTD. Puskesmas Gerunggang
 9. UPTD. Puskesmas Melintang
 10. UPTD. Puskesmas Girimaya
 11. UPTD. Puskesmas Pasir Putih
 12. UPTD. Puskesmas Air Itam

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	5	4	9
3	Golongan III	8	26	34
4	Golongan IV	1	4	5
	Jumlah	14	34	48

Sumber Data : Subbag. Umum Dinas Kesehatan Tahun 2022

Tabel 2.2
Data PNS Berdasarkan Pendidikan
Pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	3	-	3
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	4	1	9	7	21
4	D1	-	-	-	-	-
5	D3	2	11	7	20	40
6	S1	7	20	4	17	48
7	S2	-	2	-	-	2
8	S3	1	-	-	-	1
	Jumlah	14	34	23	44	115

Sumber Data : Subbag. Umum Dinas Kesehatan Tahun 2022

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Golongan	L	P
1	Golongan I	1	0
2	Golongan II	18	47
3	Golongan III	64	201
4	Golongan IV	13	17
	Jumlah	96	265

Sumber Data : Subbag. Umum RSUD Depati Hamzah Tahun 2022

Tabel 2.4
Data PNS Berdasarkan Pendidikan
Pada RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	1	-	1	2	4

2	SMP Sederajat	-	1	-	2	3
3	SMA Sederajat	6	9	68	39	122
4	D1	-	-	-	-	-
5	D3	36	136	12	55	239
6	S1	39	97	15	21	172
7	S2	14	21	3	1	39
8	S3	-	1	-	-	1
	Jumlah	96	265	99	120	580

Sumber Data : Subbag. Umum RSUD Depati Hamzah Tahun 2022

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada PJK Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	0
2	Golongan II	-	-	0
3	Golongan III	1	1	2
4	Golongan IV	1	-	1
	Jumlah	2	1	3

Sumber Data : Subbag. Umum PJK Tahun 2022

Tabel 2.6
Data PNS Berdasarkan Pendidikan
Pada PJK Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	1	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	0
3	SMA Sederajat	-	-	3	1	4
4	D1	-	-	-	-	0
5	D3	-	-	7	5	12
6	S1	1	1	1	3	6
7	S2	1	-	-	-	1

8	S3	-	-	-	-	0
	Jumlah	2	1	12	9	24

Sumber Data : Subbag. Umum PJK Tahun 2022

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Labkesda Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	0
2	Golongan II	2	2	4
3	Golongan III	2	6	8
4	Golongan IV	-	-	-
	Jumlah	4	8	12

Sumber Data : Subbag. Umum Labkesda Tahun 2022

Tabel 2.8
Data PNS Berdasarkan Pendidikan
Pada Labkesda Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	1	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	-	-	1	1	2
4	D1	-	-	-	-	-
5	D3	2	5	-	4	11
6	S1	2	3	1	4	10
7	S2	-	-	-	-	-
8	S3	-	-	-	-	-
	Jumlah	4	8	3	9	24

Sumber Data : Subbag. Umum Labkesda Tahun 2022

Tabel 2.9
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Puskesmas Air Itam Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	-	11	11
3	Golongan III	8	26	34
4	Golongan IV	-	4	4
	Jumlah	8	41	49

Sumber Data : Subbag. Umum Puskesmas Air Itam Tahun 2022

Tabel 2.10
Data PNS Berdasarkan Pendidikan
Pada Puskesmas Air Itam Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	2	1	3
3	SMA Sederajat	-	1	3	3	7
4	D1	1	1	-	1	3
5	D3	2	26	3	7	38
6	S1	5	12	2	2	21
7	S2	-	1	-	-	1
8	S3	-	-	-	-	-
	Jumlah	8	41	10	14	73

Sumber Data : Subbag. Umum Puskesmas Air Itam Tahun 2022

Tabel 2.11
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Puskesmas Pangkalbalam Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	4	8	12

3	Golongan III	6	21	27
4	Golongan IV	1	3	4
	Jumlah	11	32	43

Sumber Data : Subbag. Umum Puskesmas Pangkalbalam Tahun 2022

Tabel 2.12
Data PNS Berdasarkan Pendidikan
Pada Puskesmas Pangkalbalam Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	-	1	2	2	5
4	D1	-	-	-	-	-
5	D3	6	18	-	12	35
6	S1	5	13	-	2	20
7	S2	1	-	-	-	1
8	S3	-	-	-	-	-
	Jumlah	11	32	2	16	61

Sumber Data : Subbag. Umum Puskesmas Pangkalbalam Tahun 2022

Tabel 2.13
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Puskesmas Melintang Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	1	12	13
3	Golongan III	1	47	48
4	Golongan IV	1	-	1
	Jumlah	3	59	62

Sumber Data : Subbag. Umum Puskesmas Melintang Tahun 2022

Tabel 2.14
Data PNS Berdasarkan Pendidikan
Pada Puskesmas Melintang Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	1	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
3	SMA Sederajat	-	-	2	2	4
4	D1	-	-	-	-	-
5	D3	1	38	-	6	45
6	S1	2	21	-	1	24
7	S2	-	-	-	-	-
8	S3	-	-	-	-	-
	Jumlah	3	59	4	9	75

Sumber Data : Subbag. Umum Puskesmas Melintang Tahun 2022

Tabel 2.15
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	1	11	12
3	Golongan III	4	39	43
4	Golongan IV	-	3	3
	Jumlah	5	53	58

Sumber Data : Subbag. Umum Puskesmas Gerunggang Tahun 2022

Tabel 2.16
Data PNS Berdasarkan Pendidikan
Pada Puskesmas Gerunggang Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-

3	SMA Sederajat	1	-	3	2	6
4	D1	-	-	-	-	-
5	D3	1	42	-	4	47
6	S1	3	11	-	4	18
7	S2	-	-	-	-	-
8	S3	-	-	-	-	-
	Jumlah	5	53	3	10	71

Sumber Data : Subbag. Umum Puskesmas Gerunggang Tahun 2022

Tabel 2.17
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Puskesmas Pasir Putih Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	2	7	9
3	Golongan III	2	31	33
4	Golongan IV	-	1	1
	Jumlah	4	39	43

Sumber Data : Subbag. Umum Puskesmas Pasir Putih Tahun 2022

Tabel 2.18
Data PNS Berdasarkan Pendidikan
Pada Puskesmas Pasir Putih Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	-	-	2	2	4
4	D1	-	-	-	-	-
5	D3	3	27	-	7	37
6	D4	-	2	-	-	2
7	S1 Profesi	-	5	-	3	8
8	S1	1	5	-	2	8

9	S2	-	-	-	-	-
10	S3	-	-	-	-	-
	Jumlah	4	39	2	14	59

Sumber Data : Subbag. Umum Puskesmas Pasir Putih Tahun 2022

Tabel 2.19
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Puskesmas Girimaya Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	1	18	19
3	Golongan III	1	25	26
4	Golongan IV	-	4	4
	Jumlah	2	47	49

Sumber Data : Subbag. Umum Puskesmas Girimaya Tahun 2022

Tabel 2.20
Data PNS Berdasarkan Pendidikan
Pada Puskesmas Girimaya Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	-	1	-	7	8
4	D1	-	-	-	-	-
5	D3	1	33	4	4	42
6	S1	1	12	-	2	15
7	S2	-	1	-	-	1
8	S3	-	-	-	-	-
	Jumlah	2	47	4	13	66

Sumber Data : Subbag. Umum Puskesmas Girimaya Tahun 2022

Tabel 2.21
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Puskesmas Selindung Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	1	9	10
3	Golongan III	3	34	37
4	Golongan IV	1	-	1
	Jumlah	5	43	48

Sumber Data : Subbag. Umum Puskesmas Selindung Tahun 2022

Tabel 2.22
Data PNS Berdasarkan Pendidikan
Pada Puskesmas Selindung Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	-	-	2	2	4
4	D1	-	-	-	-	-
5	D3	1	35	3	4	43
6	S1	4	8	1	3	16
7	S2	-	-	-	-	-
8	S3	-	-	-	-	-
	Jumlah	5	43	6	9	63

Sumber Data : Subbag. Umum Puskesmas Selindung Tahun 2022

Tabel 2.23
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Puskesmas Taman Sari Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	1	10	11

3	Golongan III	4	28	32
4	Golongan IV	-	2	2
	Jumlah	5	40	45

Sumber Data : Subbag. Umum Puskesmas Taman Sari Tahun 2022

Tabel 2.24
Data PNS Berdasarkan Pendidikan
Pada Puskesmas Taman Sari Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	-	-	2	2	4
4	D1	-	-	-	-	-
5	D3	1	28	-	8	37
6	S1	4	12	-	3	19
7	S2	-	-	-	-	-
8	S3	-	-	-	-	-
	Jumlah	5	40	2	13	60

Sumber Data : Subbag. Umum Puskesmas Taman Sari Tahun 2022

Tabel 2.25
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Puskesmas Kacang Pedang Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	2	10	12
3	Golongan III	3	28	31
4	Golongan IV	1	2	3
	Jumlah	6	40	46

Sumber Data : Subbag. Umum Puskesmas Kacang Pedang Tahun 2022

Tabel 2.26
Data PNS Berdasarkan Pendidikan
Pada Puskesmas Kacang Pedang Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

No	Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	-	1	4	1	6
4	D1	-	-	-	-	-
5	D3	2	29	-	4	35
6	S1	4	11	1	-	16
7	S2	-	-	-	-	-
8	S3	-	-	-	-	-
	Jumlah	6	41	5	5	57

Sumber Data : Subbag. Umum Puskesmas Kacang Pedang Tahun 2022

- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja, kursi, mobil dinas jabatan dan mobil operasional, peralatan kantor dan sumber daya pendukung lainnya.

Tabel 2.27
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

Aset Sarana/ Prasarana	Jumlah	Kondisi (Baik/ Rusak)
Gedung		
a. Gedung Baru	-	-
b. Gedung Lama	1	Baik
c. Puskesmas Induk	9	Baik
d. Puskesmas Pembantu	19	Baik
e. Poskesdes	20	9 Baik / 11 Rusak
f. Laboaratorium Kesehatan	1	-

Komputer	25 Buah	24 Baik / 1 Rusak
Printer	31 Buah	Baik
Laptop / Notebook	6 Buah	5 Baik/ 1 Rusak
LCD	7 Buah	Baik
UPS Komputer	15 Buah	Baik
Kamera	-	-
Server dan Jaringan	1	Baik
Koneksi Internet	90 Mbps	Baik
Meublair		
a. Meja Kerja	142	119 Baik/ 23 Rusak
b. Kursi Kerja	56 Buah	Baik
c. Meja Rapat	16 Buah	Baik
d. Kursi Rapat	152 Buah	Baik
e. Lemari Arsip	33 Buah	26 Baik/ 6 Rusak
AC	33 Unit	32 Baik/ 1 Rusak
Genset		
a. Genset 175 KVa	-	-
b. Genset 25 KVa	1	Baik
c. Genset 650 KVa	-	-
d. Genset 800 KVa	-	-
Mesin Pompa Air	2	Baik

Tabel 2.28
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
Tahun 2022

Aset Sarana/ Prasarana	Jumlah	Kondisi (Baik/ Rusak)
Gedung		
a. Gedung Baru	1	Baik
b. Gedung Lama	52	Baik
Komputer	128 Buah	68 Buah Baik, 60 Buah Rusak Berat
Printer	103 Buah	58 Buah Baik, 45 Buah

		rusak Berat
Laptop / Notebook	24 Buah	14 Buah Baik, 7 Buah Kurang Baik, 3 Rusak Berat
LCD	-	-
UPS Komputer	123 Buah	93 Buah Baik, 30 Buah Rusak Berat
Kamera	1 Buah	Baik
Server dan Jaringan	2 Server	Baik
Koneksi Internet	20 Mbps	
Meublair		
a. Meja Kerja	155 Buah	55 Buah Baik, 100 Buah Rusak Berat
b. Kursi Kerja	156 Buah	111 Buah Baik, 45 Buah Rusak Berat
c. Meja Rapat	31 Buah	16 Buah Baik, 15 Buah Rusak Berat
d. Kursi Rapat	242 Buah	192 Buah Baik, 50 Buah Rusak Berat
e. Lemari Arsip	66 Buah	46 Buah Baik, 20 Buah Rusak Berat
AC	229 Buah	99 Buah Baik, 130 Buah Rusak Berat
Genset		
a. Genset 175 KVa	1 Unit	Rusak
b. Genset 250 KVa	1 Unit	Baik
c. Genset 650 KVa	1 Unit	Baik
d. Genset 800 KVa	1 Unit	Baik
Mesin Pompa Air	16 Buah	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang

Dalam Sub Bab Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang akan dibahas antara lain:

1. Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang berdasarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan.

Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang pada Renstra Perubahan Tahun 2013-2018. Adapun program dan kegiatan pada periode 2018-2023 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
Tahun 2021-2022

Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Satuan Indikator)	Capaian Kinerja	
		Tahun 2021	Tahun 2022
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	100%	100%
	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100%	100%
	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100%	100%
	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*) (Dengan Satuan:%)	100%	100%
	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat	100%	100%

	waktu (Dengan Satuan:%)		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tepat waktu (dengan satuan : persen)	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan:persen)	100%	75%
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi PAD Perangkat Daerah (Dengan Satuan:persen)	100%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:persen)	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi Umum (Dengan Satuan:persen)	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:persen)	100%	100%

Daerah			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:persen)	100%	100%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	97,84%	100%
	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	99,13%	98,18%
	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	93,30%	95,300%
	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Dengan Satuan:%)	90,49%	94,78%

	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	94,36%	97,48%
	Persentase Orang Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	95,66%	98,44%
	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	86,20%	91,100%
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (Dengan Satuan:%)	94,14%	96,06%
	Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	53,49%	100%
	Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard	95,13%	100%

	(Dengan Satuan:%)		
	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Dengan Satuan:%)	96,68%	99,36%
	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Dengan Satuan:%)	96,09%	91,47%
	prevalensi anemia pada ibu hamil (Dengan Satuan:%)	13,85%	11,78%
	proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (Dengan Satuan:%)	93,14%	96,06%
	persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (Dengan Satuan:%)	93,14%	96,06%
	angka kelahiran pada	-	0

	perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) (Dengan Satuan:%)		
	prevalensi tekanan darah tinggi (Dengan Satuan:%)	93,3%	95,30%
	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa (Dengan Satuan:Pukesmas)	9 Puskesmas	9 Puskesmas
	insiden Tuberculosis (ITB) per 100.000 penduduk (Dengan Satuan:%)	170,85%	0,59%
	Prevalensi HIV pada populasi dewasa (Dengan Satuan:%)	0,025%	0,30%
	proporsi kematian akibat keracunan (Dengan Satuan:%)	-	0
	persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (Dengan Satuan:%)	97,1%	100%
	persentase kabupaten / kota yang mencapai 80	100%	100%

	% imunisasi dasar lengkap pada bayi (Dengan Satuan:%)		
	p e r s e n t a s e kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis b (Dengan Satuan:%)	-	100%
	kejadian malaria per 1.000 orang (Dengan Satuan:per 1.000 orang)	0.01 Orang	1 Orang
	jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (Dengan Satuan:Kabupaten/Kota)	1 Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota
	Jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan (Dengan Satuan:%)	0	0
	jumlah kota dengan eliminasi kusta (Dengan Satuan:Kota)	0	0
	jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) (Dengan Satuan:Kasus)	0	0
	persentase merokok pada penduduk umur	-	3,600%

	kurang dari 18 tahun (Dengan Satuan:%)		
	persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun (Dengan Satuan:%)	-	1,26%
	prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun (Dengan Satuan:%)	0,01%	3,530%
	persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (Dengan Satuan:%)	70,2%	72,080%
	angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:%)	1,9%	3,500%
	angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:%)	2,8%	4,500%
	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada balita (Dengan Satuan:%)	0,99%	1,020%
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita	0,77%	0,650%

	(Dengan Satuan:%)		
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta (Dengan Satuan:%)	2,02%	0,920%
	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (Dengan Satuan:%)	1,04%	0,570%
	Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk (Dengan Satuan:%)	32,3%	0,260%
	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu (Dengan Satuan:%)	57,14%	100%
	p e r s e n t a s e ketersediaan obat dan vaksin di puskesm (Dengan Satuan:%)	88,89%	90%
	Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga (Dengan Satuan:%)	100%	100%
	proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun	40,48%	86,65%

	dan air (Dengan Satuan:%)		
	jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan (Dengan Satuan:%)	80,95%	80,95%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100%	100%
	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. (Dengan Satuan:%)		78%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (Dengan Satuan:%)	100%	100%

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100%	100%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan SDM kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100%	100%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan U K M di wilayah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100%	100%
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase PIRT yang memiliki izin edar (Dengan Satuan:%)	40%	100%

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dengan Satuan:%)	100%	100%
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dengan Satuan:%)	100%	100%
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Restoran dan Depot Air, Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa boga, rumah makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dengan Satuan:%)	100%	100%

Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		100%	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (Dengan Satuan:%)	100%	85,700%
	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda (Dengan Satuan:per 100.000 Penduduk)	84/100.000 Penduduk	84/100.000 Penduduk
	Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan (Dengan Satuan:%)	80,00%	100%
	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan (Dengan Satuan:%)	90,00%	103,880%
	cakupan jaminan kesehatan nasional (J K N) (D e n g a n Satuan:%)	91,00%	89,350%
	proporsi peserta program jaminan sosial b i d a n g ketenagakerjaan.	80,00%	23%

	(Dengan Satuan:%)		
	jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk (Dengan Satuan:%)	90,00%	89,35%
	kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (Dengan Satuan:%)	0,58%	13,700%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100%	100%
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100%	100%
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) T i	100%	100%

(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	n g k a t D a e r a h Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)		
--------------------------------------	--	--	--

2.4 Tantangan

1. Masih adanya kepercayaan masyarakat terhadap dukun untuk melakukan pertolongan persalinan dengan pertimbangan lebih kekeluargaan.
2. Masih adanya masyarakat yang menyembunyikan kasus ODGJ berat didalam keluarganya sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai standard.

2.5 Peluang

1. Adanya peraturan perundang-undangan
2. Adanya Juklak dan Juknis Program
3. Adanya koordinasi lintas sektor terkait
4. Adanya dukungan organisasi profesi dan ormas terkait
5. Adanya media informasi massa
6. Akses pelayanan kesehatan terjangkau
7. Tersedianya anggaran kesehatan bersumber diluar APBD
8. Adanya fasilitas kesehatan swasta (Rumah Sakit Swasta, Klinik, Dokter Praktek, dan Bidan Praktek) yang melaksanakan program kesehatan

2.6 Kelemahan

Rendahnya kunjungan masyarakat di fasilitas kesehatan dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang program kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan.

2.7 Kekuatan

Pembangunan kesehatan yang di fokuskan pada upaya promotif, preventif, pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM), implementasi GERMAS (gerakan masyarakat , PISPK (Program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga) , dan keanggotaan PBI (penerima bantuan iuran) serta penyediaan sarana prasarana, SDM Kesehatan dan pemenuhan obat – obatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan di dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pengintegrasian kajian berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dan dengan memperhatikan tantangan dan permasalahan yang mengacu pada hasil telaah Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, Renstra Kementerian/Lembaga, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, maka dapat disusun isu-isu strategis yang akan menjadi landasan penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang sampai dengan tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pada bagian ini akan diuraikan identifikasi permasalahan yang harus dihadapi Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan-permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Tingginya kasus Hipertensi dan Diabetes Melitus pada penduduk

usia produktif

2. Meningkatnya kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
3. Meningkatnya orang dengan Tuberkulosis
4. Meningkatnya kasus Orang Dengan HIV/AIDS (ODHIV)
5. Belum tersedianya program kegiatan malaria lanjutan pasca eliminasi
6. Masih tingginya kasus kematian ibu dan bayi di Kota Pangkalpinang
7. Belum semua posyandu di Kota Pangkalpinang menjadi posyandu terintegrasi
8. Masih ada kelurahan di Kota Pangkalpinang yang belum ODF
9. Masih adanya kasus gizi buruk
10. Belum optimalnya fungsi Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat dasar
11. Belum optimalnya penyediaan kebutuhan obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas
12. Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan olahan

3.2 Telaah Tujuan, Sasaran dan Rencana Pembangunan Daerah

Menelaah tujuan, sasaran, dan program daerah dan ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran daerah ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang untuk Tahun 2024-2026 mendukung tujuan perangkat daerah yakni :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang berdaya saing.
 2. Akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender
- Sedangkan sasaran perangkat daerah yaitu :
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan Terhadap Pencapaian Tujuan, Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

No	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing Sasaran : 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Tingginya kasus Hipertensi dan Diabetes Melitus	a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengakses fasilitas pelayanan kesehatan b. Adanya rasa malu/takut pada masyarakat jika penyakit telah diketahui c. Tingginya data estimasi penderita hipertensi d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. e. Sulitnya merubah <i>life style</i> masyarakat f. Menjamurnya makanan dan minuman cepat saji	a. SDM sudah terlatih b. Adanya dukungan anggaran walaupun masih terbatas c. Adanya Posbindu PTM <i>mobile</i> di kelurahan dan Posbindu cerdas di sekolah

			g. Kurang optimalnya sosialisasi tentang hipertensi dan diabetes melitus kepada masyarakat h. Masyarakat merasa sehat karena tidak adanya gejala spesifik hipertensi dan masyarakat tidak mengetahui gejala spesifik dari Diabetes Melitus	
2	Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing Sasaran : 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	a. Masih ada sebagian anggota keluarga yang menganggap keluarganya tidak mengidap gangguan jiwa. b. Melemahnya sektor per ekonomian kebutuhan hidup semakin meningkat/ imbas dari Pandemi COVID-19. c. SDM kesehatan jiwa belum semua terlatih d. Obat-Obatan kesehatan	a. Sudah adanya dokter kesehatan jiwa di 5 (Lima) Puskesmas di Kota Pangkalpinang dan RSUD Depati Hamzah. b. Adanya Tim Pelaksana kesehatan jiwa masyarakat. b. Tingginya semangat petugas pengelola program kesehatan jiwa

			jiwa sebagian tidak terpenuhi	
3	Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing Sasaran : 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kasus orang dengan Tuberkulosis	a. Masih rendahnya investigasi kontak kasus indeks b. Masih adanya penolakan dari kasus indeks/ kontak untuk dilakukan pemeriksaan sehingga menyebabkan penularan TB di masyarakat. c. Beberapa pasien masih belum teratur minum obat sehingga menyebabkan keterlambatan kesembuhan, resiko terjadinya resisten obat, dan terjadinya penularan di masyarakat	a. Adanya regulasi kepala daerah dalam penanggulangan Aids, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) b. Peran aktif konsorsium Pena Bulu sebagai mitra dalam pengendalian Tuberkulosis c. Dukungan Forum CSR Kota Pangkalpinang d. Keterlibatan kader dalam penanggulangan Tuberkulosis
4	Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing Sasaran : 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kasus Orang Dengan HIV/ AIDS (ODHIV)	a. Masih adanya stigma di masyarakat tentang penyakit HIV/AIDS. b. Masih tingginya komunitas perilaku berisiko c. Belum semua unsur masyarakat berperan aktif	a. Adanya regulasi kepala daerah dalam penanggulangan Aids, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) b. Adanya lembaga swadaya masyarakat yang berpartisipasi

			dalam upaya pencegahan d. Meningkatnya jumlah kelompok perilaku beresiko dengan alasan faktor ekonomi	dalam pengendalian HIV.AIDS c. Ketersediaan obat-obatan dan logistic untuk pengelolaan ODHIV
5	Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing Sasaran : 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Belum tersedianya program kegiatan malaria lanjutan pasca eliminasi	a. Tidak tersedianya laporan dan data dari pemegang program sebelumnya b. Belum tersedianya kegiatan program malaria lanjutan pasca eliminasi di fasyankes	a. Terbentuknya POKJA Malaria Kota Pangkalpinang b. Adanya dukungan dari forum CSR Kota Pangkalpinang c. Adanya dukungan pembentukan kader malaria
6	Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing Sasaran : 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Masih tingginya kasus kematian ibu dan bayi di Kota Pangkalpinang	Kurangnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan di Fasyankes	Mudahnya akses ke Fasilitas pelayanan tingkat lanjutan
7	Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing Sasaran : 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Belum semua posyandu di Kota Pangkalpinang menjadi posyandu terintegrasi	a. Sarana dan kelengkapan pelayanan di posyandu masih kurang memadai b. Pemahaman para stakeholder masih menganggap Posyandu	Adanya komitmen kepala daerah dalam mendukung pelayanan di Posyandu supaya lebih optimal serta keterlibatan OPD lain dalam memanfaatkan Posyandu sebagai salah satu

			milik Dinas kesehatan c. Pelayanan di Posyandu belum holistik (masih terbatas usia tertentu)	lembaga kemasyarakatan kelurahan
8	Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing Sasaran : 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Masih ada kelurahan di Kota Pangkalpinang yang belum ODF	Tidak adanya lahan tempat pembangunan septictank dan sebagian wilayah tempat tinggal masyarakat di daerah pesisiran	Adanya komitmen dalam pelaksanaan kota Sehat
9	Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing Sasaran : 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Masih adanya kasus gizi buruk	Pola asuh orang tua dan penyakit penyerta	Adanya Tim Asuhan Gizi buruk di setiap Puskesmas
10	Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing Sasaran : 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Belum optimalnya fungsi puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat dasar	1. Masih adanya puskesmas yang sarana, Prasarana, dan alat kesehatannya belum sesuai dengan Permenkes no 43 tahun 2019. Adanya komitmen dinas Kesehatan dan kementerian Kesehatan dalam	Adanya komitmen dinas Kesehatan dan kementerian Kesehatan dalam meningkatkan pembangunan dan penyediaan SDM kesehatan secara bertahap

			meningkatkan pembangunan dan penyediaan SDM kesehatan secara bertahap. 2. Masih kurangnya sumber daya kesehatan yang sesuai standar dalam menunjang pelayanan kesehatan. 3. Masih adanya Puskesmas yang belum memiliki Pelayanan Poned	
11	Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing Sasaran : 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Belum optimalnya penyediaan kebutuhan obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas	1. Informasi ketersediaan obat dan BMHP oleh penyedia yang tidak pasti 2. Ketersediaan obat di distributor terbatas	Adanya anggaran yang mendukung pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
12	Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing Sasaran : 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan olahan	1. Kerja sama lintas sektor dalam pengawasan makanan olahan dan siap saji perlu di optimalkan 2. Padatnya jadwal pelaksanaan kegiatan di dinas Kesehatan	1. Kerjasama yang baik antara dinas kesehatan dan BPOM dalam proses uji sampel 2. Terdapat sarana IRTTP yang banyak dan perlunya tenaga/petugas unyuk pelaksanaan pengawasan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden di bidang kesehatan, yaitu:

Visi

“Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan”

Misi

- a. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
- b. Menurunkan angka stunting pada balita
- c. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional, dan
- b. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Misi Presiden dan juga Misi Kementerian Kesehatan yang selaras dengan bidang kesehatan, adalah Nawa Cita Presiden, yang ke-5, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”

(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kota Pangkalpinang yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.
- b. Pangkalpinang Nyaman, merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.
- c. Unggul, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (self determination), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (equality) dan pemerataan (equity).
- d. Makmur, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi. Oleh karena itu perlu dilihat keterkaitan Antara unsur-unsur visi dengan misi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan RI Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Kesehatan RI	Permasalahan pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Peningkatan Pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan	Tingginya kasus Hipertensi dan Diabetes Melitus	a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengakses	a. SDM sudah terlatih b. Adanya dukungan anggaran walaupun

	ke daruratan kesehatan masyarakat		fasilitas pelayanan kesehatan b. Adanya rasa malu/ takut masyarakat jika penyakit telah diketahui c. Tingginya data estimasi penderita hipertensi d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. e. Sulitnya merubah Life Style masyarakat f. Menjamurnya makanan dan minuman cepat saji g. Kurang optimalnya sosialisasi tentang hipertensi dan Diabetes Melitus kepada masyarakat h. Masyarakat merasa sehat	masih terbatas c. Adanya Posbindu PTM mobile di Kelurahan dan posbindu Cerdik disekolah
--	--	--	--	---

			karena tidak adanya gejala spesifik hipertensi dan masyarakat tidak mengetahui gejala spesifik dari Diabetes melitus	
2.	Peningkatan Pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Meningkatnya kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	a. Masih ada sebagian anggota keluarga yang mengganggu keluarganya tidak mengidap gangguan jiwa. b. Melemahnya sektor per ekonomian kebutuhan hidup semakin meningkat/ imbas dari Pandemi COVID-19. c. SDM kesehatan jiwa belum semua terlatih d. Obat- Obatan kesehatan jiwa sebagian	a. Sudah adanya dokter kesehatan jiwa di 5 (Lima) Puskesmas di Kota Pangkalpinang dan RSUD Depati Hamzah. b. Adanya Tim Pelaksana kesehatan jiwa masyarakat. c. Tingginya semangat petugas pengelola program kesehatan jiwa

			tidak terpenuhi	
3	Peningkatan Pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Meningkatnya kasus orang dengan Tuberkolosis	a. Masih rendahnya investigasi kontak kasus indeks b. Masih adanya penolakan dari kasus indeks/ kontak untuk dilakukan pemeriksaan sehingga menyebabkan penularan TB di masyarakat. c. Beberapa pasien masih belum teratur minum obat sehingga menyebabkan keterlambatan kesembuhan, resiko terjadinya resisten obat, dan terjadinya penularan di masyarakat	a. Adanya regulasi kepala daerah dalam penanggulangan Aids, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) b. Peran aktif konsorsium Pena Bulu sebagai mitra dalam pengendalian Tuberkolosis c. Dukungan Forum CSR Kota Pangkalpinang d. Keterlibatan kader dalam penanggulangan Tuberkulosis
4	Peningkatan Pencegahan dan pengendalian penyakit dan	Meningkatnya kasus Orang Dengan HIV/ AIDS (ODHIV)	a. Masih adanya stigma di masyarakat tentang penyakit	a. Adanya regulasi kepala daerah dalam penanggulangan

	pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat		HIV/AIDS. b. Masih tingginya komunitas perilaku berisiko c. Belum semua unsure masyarakat berperan aktif dalam upaya pencegahan d. Meningkatnya jumlah kelompok perilaku berisiko dengan alasan factor ekonomi	gan Aids, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) b. Adanya lembaga swadaya masyarakat yang berpartisipasi dalam pengendalian HIV.AIDS c. Ketersedian obat-obatan dan logistic untuk pengelolaan ODHIV
5	Tercapainya kegiatan promotif, preventif, kuratif program Malaria pasca Eliminasi	Belum tersedianya program kegiatan malaria lanjutan pasca Eliminasi	a. Tidak tersedianya laporan dan data dari pemegang program sebelumnya b. Belum tersedianya kegiatan program malaria lanjutan pasca eliminasi di fasyankes	a. Terbentukny a POKJA Malaria Kota Pangkalpinang b. Adanya dukungan dari forum CSR Kota Pangkalpinang c. Adanya dukungan pembentuk n kader malaria
6	Terkelolanya	Masih tingginya	Kurangnya	Mudahnya akses ke Fasilitas

	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi	kasus kematian ibu dan bayi di Kota Pangkalpinang	kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan di Fasyankes	pelayanan tingkat lanjutan
7	Terkelolanya Pelayanan Posyandu	Belum semua posyandu di Kota Pangkalpinang menjadi posyandu terintegrasi	a. Sarana dan kelengkapan pelayanan di posyandu masih kurang memadai b. Pemahaman para stakeholder masih menganggap Posyandu milik Dinas kesehatan c. Pelayanan di Posyandu belum holistik (masih terbatas usia tertentu)	Adanya komitmen kepala daerah dalam mendukung pelayanan di Posyandu supaya lebih optimal serta keterlibatan OPD lain dalam memanfaatkan Posyandu sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan kelurahan
8	Terselanggara Kabupaten / Kota Sehat	Masih ada kelurahan di Kota Pangkalpinang yang belum ODF	Tidak adanya lahan tempat pembangunan septictank dan sebagian wilayah tempat tinggal masyarakat di daerah pesisiran	Adanya komitmen dalam pelaksanaan kota Sehat
9	Terkelolanya	Masih adanya kasus	Pola asuh orang	Adanya Tim

	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	gizi buruk	tua dan penyakit penyerta	Asuhan Gizi buruk di setiap Puskesmas
10	Meningkatnya ketersediaan Fasyankes dan Mutu yankes	Belum optimalnya fungsi puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat dasar	a. Masih adanya puskesmas yang sarana, Prasarana, dan alat kesehatannya belum sesuai dengan Permenkes no 43 tahun 2019. b. Adanya komitmen dinas Kesehatan dan kementerian Kesehatan dalam meningkatkan pembangunan dan penyediaan SDM kesehatan secara bertahap. a. Masih kurangnya sumber daya kesehatan yang sesuai standar dalam menunjang	Adanya komitmen dinas Kesehatan dan kementerian Kesehatan dalam meningkatkan pembangunan dan penyediaan SDM kesehatan secara bertahap

			elayanan kesehatan. c. Masih adanya Puskesmas yang belum memiliki Pelayanan Poned	
11	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas	Belum optimalnya penyediaan kebutuhan obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas	a. Informasi ketersediaan obat dan BMHP oleh penyedia yang tidak pasti b. Ketersediaan obat di distributor terbatas	Adanya anggaran yang mendukung pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
12	Meningkatnya ketersediaan pengawasan keamanan pangan olahan	Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan olahan	a. Kerja sama lintas sektor dalam pengawasan makanan olahan dan siap saji perlu di optimalkan b. Padatnya jadwal pelaksanaan kegiatan di dinas Kesehatan	a. Kerjasama yang baik antara dinas kesehatan dan BPOM dalam proses uji sampel b. Terdapat sarana IRTTP yang banyak dan perlunya tenaga/petugas unyuk pelaksanaan pengawasan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Mendasarkan pada RTRW tersebut, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang secara umum dan dengan memperhatikan permasalahan mengacu pada Renstra Kementerian/Lembaga, Pencapaian TPB/SDGs dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang 2024–2026 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapatlah diidentifikasi isu-isu strategis yang akan menjadi landasan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang tiga tahun mendatang sebagai berikut:

1. Tingginya kasus Hipertensi dan Diabetes Melitus pada penduduk usia produktif
2. Meningkatnya kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
3. Meningkatnya kasus Orang Dengan HIV/AIDS (ODHIV)
4. Meningkatnya orang dengan Tuberkulosis
5. Belum tersedianya program kegiatan malaria lanjutan pasca eliminasi
6. Masih tingginya kasus kematian ibu dan bayi di Kota Pangkalpinang
7. Belum semua posyandu di Kota Pangkalpinang menjadi Posyandu terintegrasi
8. Belum semua kelurahan di Kota Pangkalpinang ODF (Open Defecation Free) / Bebas Buang Air Besar Sembarangan)
9. Masih adanya kasus gizi buruk di Kota Pangkalpinang
10. Belum optimalnya fungsi Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat dasar
11. Penyediaan kebutuhan obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas perlu di optimalkan.
12. Keamanan pangan olahan perlu pengawasan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk tiga tahun mendatang dalam Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang rentang waktu Tahun 2024-2026. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan nasional maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 adalah Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender dengan indikator tujuan adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Tujuan/Sasaran RPD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD
Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing					
	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan			
			Meningkatkan Usia Harapan Hidup		
				Capaian SPM Kesehatan	Pelayanan Kesehatan ibu hamil
					Pelayanan Kesehatan ibu bersalin
					Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir
					Pelayanan Kesehatan Balita
					Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar

					Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
					Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
					Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi
					Pelayanan Kesehatan orang dengan diabetes melitus
					Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
					Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis
					Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
				Menurunkan angka kematian ibu	Angka Kematian Ibu
				Menurunkan angka kesakitan	Angka Kesakitan
				Menurunkan angka kematian bayi	Angka Kematian Bayi
				Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk	Prevalensi Gizi Buruk

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah yang tertuang dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, seperti yang tergambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
Tahun 2024 – 2026

Tujuan/Sasaran (IKU) Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran (IKU) Perangkat Daerah	Definisi Operasional
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Usia Harapan Hidup	
Meningkatkan Capaian SPM	Pelayanan SPM	Terlaksananya Pelayanan SPM sesuai standar
Menurunkan angka kematian ibu	Angka Kematian Ibu	Jumlah ibu yang meninggal (hamil-melahirkan/nifas sampai dengan 42 hari dibagi jumlah kelahiran hidup x 100.000
Menurunkan angka kesakitan	Angka Kesakitan	Jumlah penduduk yang mengalami keluhan dibagi jumlah penduduk x 100
Menurunkan angka kematian bayi	Angka Kematian Bayi	Jumlah kematian bayi 0 s/d11 bulan dibagi jumlah kelahiran hidup x 1000
Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk	Prevalensi Gizi Buruk	Jumlah penderita gizi buruk yang ditemukan dibagi jumlah sasaran

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang tahun

2024-2026, diperlukan penentuan target atas indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang setiap tahunnya.

Data target indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi	Target Kinerja			Kondisi Akhir
				2022	2024	2025	2026	
Meningkatkan Usia Harapan Hidup								
	Capaian SPM Kesehatan							
		Pelayanan Kesehatan ibu hamil	%	94,77%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	%	96,06%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	99,36%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Balita	%	91,48%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	%	91,12%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	%	98,56%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	%	97,48%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi	%	95,29%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan orang	%	98,19%	100%	100%	100%	100%

		dengan diabetes melitus						
		Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis	%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	%	100%	100%	100%	100%	100%
	Menurunkan angka kematian ibu	Angka Kematian Ibu	Angka	112	110	105	100	100
	Menurunkan angka kesakitan	Angka Kesakitan	Angka	33,63	33,00	32,00	31,00	31,00
	Menurunkan angka kematian bayi	Angka Kematian Bayi	Angka	2,5	2,4	2,3	2,2	2,2
	Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk	Prevalensi Gizi Buruk	%	0,99	0,80	0,70	0,60	0,60

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan adalah melalui:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan cakupan, mutu, akses dan keberlangsungan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.
2. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
3. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat serta intervensi masalah gizi di masyarakat seperti stunting
4. Meningkatkan akses dan mutu fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)
5. Meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan
6. Pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin/tidak mampu

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Capaian SPM Kesehatan 2. Menurunkan angka kematian ibu 3. Menurunkan angka kesakitan 4. Menurunkan angka kematian bayi 5. Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk	1. Peningkatan kesehatan keluarga dan Peningkatan mutu gizi perorangan dan masyarakat melalui kebijakan Perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan secara sinergis, komprehensif 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	1. Peningkatan cakupan, mutu, akses dan keberlangsungan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas 2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat serta intervensi masalah gizi di masyarakat seperti stunting 3. Meningkatkan akses dan mutu fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) 4. Meningkatkan akses dan mutufasilitas pelayanan 5. Pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin/tidak mampu

BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari program pembangunan Kota Pangkalpinang yang berisi program untuk mewujudkan visi dan misi kota.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub Tahun 2024-2026 terdiri dari 5 Program, 20 kegiatan dan 113 Sub kegiatan sebagaimana rincian berikut :

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X					
X	XX				
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X	XX	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
X	XX	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
X	XX	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
X	XX	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
X	XX	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan

					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X	XX	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X	XX	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
X	XX	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X	XX	01	202	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
X	XX	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
X	XX	01	204		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
X	XX	01	204	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
X	XX	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
X	XX	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
X	XX	01	205	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
X	XX	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
X	XX	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah
X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
X	XX	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
X	XX	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan

					Peraturan Perundang-undangan
X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X	XX	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
X	XX	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X	XX	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
X	XX	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	01	210		Peningkatan Pelayanan BLUD
X	XX	01	210	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN

					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	02	201		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1	02	02	201	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1	02	02	201	02	Pembangunan Puskesmas
1	02	02	201	05	Pengembangan Rumah Sakit
1	02	02	201	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1	02	02	201	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
1	02	02	201	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	201	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	201	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	201	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	201	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	201	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	201	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
1	02	02	201	16	Pengadaan Obat, Vaksin
1	02	02	201	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai
1	02	02	201	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	201	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	201	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	201	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin,

					Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	201	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
1	02	02	202		Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1	02	02	202	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1	02	02	202	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1	02	02	202	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
1	02	02	202	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1	02	02	202	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
1	02	02	202	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
1	02	02	202	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1	02	02	202	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
1	02	02	202	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
1	02	02	202	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
1	02	02	202	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
1	02	02	202	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
1	02	02	202	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1	02	02	202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

1	02	02	202	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1	02	02	202	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1	02	02	202	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
1	02	02	202	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
1	02	02	202	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
1	02	02	202	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
1	02	02	202	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1	02	02	202	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1	02	02	202	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
1	02	02	202	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
1	02	02	202	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
1	02	02	202	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	202	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1	02	02	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Gerunggang
1	02	02	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Selindung
1	02	02	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Pasir Putih
1	02	02	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Air Itam
1	02	02	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Girimaya
1	02	02	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Taman Sari

1	02	02	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Pangkalbalam
1	02	02	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kacang Pedang
1	02	02	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Melintang
1	02	02	202	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	202	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
1	02	02	202	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
1	02	02	202	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
1	02	02	202	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis
1	02	02	202	41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA)
1	02	02	202	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
1	02	02	203		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1	02	02	203	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
1	02	02	203	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
1	02	02	203	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
1	02	02	204		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	02	204	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
1	02	02	204	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat

					Daerah Kabupaten/Kota
1	02	02	204	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
1	02	02	204	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1	02	03	202		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1	02	03	202	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
1	02	03	202	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
1	02	03	202	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	03	202	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1	02	04	201		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1	02	04	201	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1	02	04	201	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1	02	04	203		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1	02	04	203	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1	02	04	204		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1	02	04	204	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1	02	04	205		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
1	02	04	205	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1	02	05	201		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah

					Kabupaten/Kota
1	02	05	201	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
1	02	05	202		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	05	202	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1	02	05	203		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	05	203	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 berikut (terlampir):

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kota Pangkalpinang

2023-06-06

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat															
	Meningkatkan capaian SPM Kesehatan ; Menurunkan angka kematian ibu ; Menurunkan angka kesakitan ; Menurunkan angka kematian bayi ; Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk														
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bidang Dinkes (Dengan Satuan:Nilai)	75,02	75,10	134.797.072.534	75,15	139.180.231.550	75,20	143.013.529.786	75,20	416.990.833.870	SEKRETARIS (DINKES)		
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	90,18	90,20		90,22		90,24		90,24		SEKRETARIS (DINKES)		
	1.02.01.2.01	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	0	100	437.000.000	100	443.118.000	100	451.227.059	100	1.331.345.059	Subbag Keuangan dan PEP		
	1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)		4	272.000.000	4	275.808.000	4	280.855.286		828.663.286	Subbag Keuangan dan PEP	K o t a Pangkal Pinang	
	1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		1	25.000.000	1	25.350.000	1	25.813.905		76.163.905	Subbag Keuangan dan PEP	K o t a Pangkal Pinang	
	1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		1	25.000.000	1	25.350.000	1	25.813.905		76.163.905	Subbag Keuangan dan PEP	K o t a Pangkal Pinang	
	1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		1	25.000.000	1	25.350.000	1	25.813.905		76.163.905	Subbag Keuangan dan PEP	K o t a Pangkal Pinang	
	1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		1	25.000.000	1	25.350.000	1	25.813.905		76.163.905	Subbag Keuangan dan PEP	K o t a Pangkal Pinang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		3	35.000.000	3	35.490.000	3	36.139.467		106.629.467	Subbag Keuangan dan PEP	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)		2	30.000.000	2	30.420.000	2	30.976.686		91.396.686	Subbag Keuangan dan PEP	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	100	93.427.558.834	100	94.735.544.658	100	96.469.205.125	100	284.632.308.617	Subbag Keuangan dan PEP	
		1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)		785	93.357.058.834	785	94.664.057.658	785	96.396.409.913		284.417.526.405	Subbag Keuangan dan PEP	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		712	40.000.000	712	40.560.000	712	41.302.248		121.862.248	Subbag Keuangan dan PEP	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		4	20.000.000	4	20.280.000	4	20.651.124		60.931.124	Subbag Keuangan dan PEP	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dengan Satuan:Dokumen)		-	500.000	-	507.000	-	516.278		1.523.278	Subbag Keuangan dan PEP	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		4	10.000.000	4	10.140.000	4	10.325.562		30.465.562	Subbag Keuangan dan PEP	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		0		0		0	-	
		1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)			0		0		0		0	-	
		1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*) (Dengan Satuan:%)	0	0,15	5.000.000	0,13	5.070.000	0,12	5.162.781	0	15.232.781	-	
		1.02.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)			0		0		0		0	-	K o t a Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Laporan)		1	5.000.000	1	5.070.000	1	5.162.781		15.232.781	Subbag Keuangan dan PEP	Kota Pangkal Pinang
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	0	0	251.000.000	0	254.514.000	0	259.171.606	0	764.685.606	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)		1	250.000.000	1	253.500.000	1	258.139.050		761.639.050	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)		1	500.000	1	507.000	1	516.278		1.523.278	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)		30	500.000	32	507.000	35	516.278		1.523.278	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	0	100	774.875.000	100	785.723.250	100	800.101.985	100	2.360.700.235	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		4	13.000.000	4	13.182.000	4	13.423.231		39.605.231	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	500.000	1	507.000	1	516.278		1.523.278	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		4	45.000.000	4	45.630.000	4	46.465.029		137.095.029	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		4	218.875.000	4	221.939.250	4	226.000.738		666.814.988	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		30	32.000.000	30	32.448.000	30	33.041.798		97.489.798	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)		2	5.000.000	2	5.070.000	2	5.162.781		15.232.781	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		4	460.000.000	4	466.440.000	4	474.975.852		1.401.415.852	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)		1	500.000	1	507.000	1	516.278		1.523.278	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0		0		0	-	
		1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)			0		0		0		0	-	
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	0	100	3.761.630.200	100	3.814.293.023	100	3.884.094.585	0	11.460.017.808	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		1	208.000.000	1	210.912.000	1	214.771.690		633.683.690	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		4	70.080.000	4	71.061.120	4	72.361.538		213.502.658	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		4	3.483.550.200	4	3.532.319.903	4	3.596.961.357		10.612.831.460	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	0	100	3.140.008.500	100	4.141.968.619	100	4.144.566.645	100	11.426.543.764	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)		1	29.529.000	1	29.942.406	1	30.490.352		89.961.758	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)			110.479.500		112.026.213		114.076.293		336.582.006	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)		-	1.500.000.000	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000		5.500.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)		-	1.500.000.000	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000		5.500.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kota Pangkal Pinang
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD (Dengan Satuan:%)	0	18	33.000.000.000	36	35.000.000.000	100	37.000.000.000	100	105.000.000.000	RSUD Depati Hamzah.	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Dengan Satuan:Unit Kerja)		-	33.000.000.000	-	35.000.000.000	-	37.000.000.000		105.000.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Dengan Satuan:%)	NA	100	110.334.784.624	100	108.506.130.606	100	109.224.893.925	100	328.065.809.155	-	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan persalinan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		-	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan persalianan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		-	
				Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		-	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		-	
				Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		-	
				Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		-	
				Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		-	
				Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		-	
				Terlaksananya pelayanan orang terduga TB sesuai standard (Dengan Satuan:%)	105	100		100		100		100		-	
				Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		-	
				Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Prevalensi Wasting (gizi kurang dan gizi buruk) (Dengan Satuan:%)	1	0,9		0,8		0,7		0,7		-	
				Persentase sarana air minum yang diawasi/ yang diperiksa sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		-	
				Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standard (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		-	
				Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		-	
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya Kesehatan Kerja dan Olaraga (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		-	
				Persentase Kab/Kota yang menerapkan GERMAS (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		-	
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		-	
				Cakupan deteksi dini penyakit Hepatitis B (Dengan Satuan:%)	81	82		83		85		85		-	
				Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		-	
				Prevalensi HIV/AIDS (Dengan Satuan:%)	0.0040	0.0039		0.0038		0.0037		0.0037		-	
				Cakupan Kelurahan UCI (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		-	
				Angka Kejadian Malaria (Dengan Satuan:Per 1000)	0.008	<1		<1		<1		<1		-	
				Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi <24 jam (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		-	
				Cakupan penemuan orang dengan NAPZA (Dengan Satuan:%)	0	0		0		0		0		-	
				Persentase Integrasi Sistem Informasi Kesehatan (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		-	
				Persentase Puskesmas yang sesuai standard (Dengan Satuan:%)	NA	80		100		100		100		-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial (Dengan Satuan:%)	NA	80		100		100		100		-	
				Persentase Puskesmas dengan alat kesehatan terkalibrasi (Dengan Satuan:%)	80	90		90		90		90		-	
				Terlaksananya program UHC (Dengan Satuan:%)	NA	98		98		98		98		-	
				Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda (Dengan Satuan:Per 100.000 Penduduk)	NA	86		86		86		86		-	
				Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Depati Hamzah (Dengan Satuan:%)	83,78	90		91		92		92		RSUD Depati Hamzah	
				Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk (Dengan Satuan:%)	71	77		85		100		92		RSUD Depati Hamzah	
				Persentase pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik di RSUD Depati Hamzah sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		RSUD Depati Hamzah	
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		RSUD Depati Hamzah	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	0	100	74.675.500.000	100	72.162.291.081	100	64.791.932.335	0	211.629.723.416	RSUD Depati Hamzah.	
				Persentase Puskesmas dan Labkes dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	50	80		100		100		0		Sub Koordinator kefarmasian dan alat kesehatan	
				Persentase Obat dan Vaksin yang disediakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		0		Sub Koordinator kefarmasian dan alat kesehatan	
				Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		0		Sub Koordinator pelayanan kesehatan	
		1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Dengan Satuan:Unit)		-	5.000.000.000	-	0	-	0		5.000.000.000	RSUD Depati Hamzah.	Kota Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)		3	35.301.000.000	-	0	-	0		35.301.000.000	Sub Koordinator pelayanan kesehatan	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Dengan Satuan:Unit)		1	21.000.000.000	1	14.584.256.081	1	11.277.357.611		46.861.613.692	RSUD Depati Hamzah.	
		1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Dengan Satuan:Unit)		-	0	-	18.900.000.000	-	0		18.900.000.000	RSUD Depati Hamzah.	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Dengan Satuan:Unit)		4	3.500.000.000	5	14.800.500.000	6	20.136.993.333		38.437.493.333	Sub Koordinator pelayanan kesehatan	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dengan Satuan:Unit)		1	1.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000		7.000.000.000	Sub Koordinator pelayanan kesehatan	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		1	1.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000		7.000.000.000	Sub Koordinator pelayanan kesehatan	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)			1.200.000.000		2.100.000.000		10.100.000.000		13.400.000.000	RSUD Depati Hamzah.	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		1	750.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000		6.750.000.000	Sub Koordinator pelayanan kesehatan	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Dengan Satuan:Unit)		1	1.000.000.000	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000		3.400.000.000	Sub Koordinator pelayanan kesehatan	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		225.000.000	Sub Koordinator kefarmasian dan alat kesehatan	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		39	847.000.000	39	1.500.000.000	39	2.000.000.000		4.347.000.000	Sub Koordinator kefarmasian dan alat kesehatan	K o t a Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan (Dengan Satuan:Unit)		1	1.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000		7.000.000.000	Sub Koordinator pelayanan kesehatan	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan (Dengan Satuan:Unit)		1	1.500.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000		7.500.000.000	Sub Koordinator pelayanan kesehatan	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Dengan Satuan:Unit)		1	1.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000		7.000.000.000	Sub Koordinator pelayanan kesehatan	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dengan Satuan:Paket)		1	500.000.000	1	1.000.000.000	1	2.000.000.000		3.500.000.000	Sub Koordinator kefarmasian dan alat kesehatan	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.01.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Dengan Satuan:Keluarga)		61,104	2.500.000	61,104	2.535.000	61,104	2.581.391		7.616.391	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk ibu bersalin (Dengan Satuan:%)	0	100	35.408.284.624	100	36.084.542.525	100	44.164.294.604	100	115.657.121.753	Sub Koordinator kesehatan keluarga dan gizi	
				Persentase layanan kesehatan untuk ibu hamil (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		Sub Koordinator kesehatan keluarga dan gizi	
				Persentase layanan kesehatan untuk bayi baru lahir (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		Sub Koordinator kesehatan keluarga dan gizi	
				Persentase layanan kesehatan untuk balita (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		0		Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	
				Persentase layanan kesehatan untuk Anak Usia Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		0		Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	
				Persentase layanan kesehatan untuk usia 15 - 59 tahun (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		0		Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Persentase layanan kesehatan untuk usia 60 tahun keatas (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		0		Sub Koordinator kesehatan keluarga dan gizi	
				Persentase layanan kesehatan untuk penderita hipertensi (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		0		Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	
				Persentase layanan kesehatan untuk penderita DM (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		0		Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	
				Tingkat prevalensi TB (per 100.000 Penduduk) (Dengan Satuan:per 100.000)	167,58	165		164,50		164		0		Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit menular	
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		0		Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit menular	
				Persentase layanan kesehatan untuk penderita ODGJ (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		0		Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	
				Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	NA	0		0		0		0		RSUD Depati Hamzah.	
				Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan asi eksklusif (Dengan Satuan:%)	70,20	71		72		73		0		Sub Koordinator kesehatan keluarga dan gizi	
				Persentase Kelurahan dengan Stop BABS (Dengan Satuan:%)	80,95	100		100		100		0		Sub Koordinator kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga	
				Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		0		Sub Koordinator kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga	
				Persentase Pos UKK yang telah melaksanakan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Dengan Satuan:%)	47,62	59,52		69,05		76,19		0		Sub Koordinator kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Persentase tersusunnya laporan GERMAS (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		0		Sub Koordinator promosi dan pemberdayaan masyarakat	
				Persentase tersusunnya laporan Kab/Kota Sehat (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		0		Sub Koordinator kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga	
				Angka Kematian DBD (Dengan Satuan:%)	0,7	1		1		1		0		Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit menular	
				Persentase penurunan angka kejadian Kanker Serviks (Dengan Satuan:%)	30	-16,67		-20,00		-25,00		0		Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit menular	
				Persentase tersusunnya laporan orang dengan HIV (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		0		Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit menular	
				Cakupan imunisasi campak (Dengan Satuan:%)	94,2	94,5		94,8		95		0		Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi	
				Persentase tersusunnya laporan kejadian malaria (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		0		-	
				Persentase tersusunnya laporan Kasus KLB (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		0		-	
				Persentase tersusunnya laporan NAPZA (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		0		-	
				Persentase Puskesmas yang mempunyai minimal 75% dengan pencapaian SPM (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		0		-	
				Persentase ketersediaan tempat tidur (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		0		-	
				Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya sesuai standar (Dengan Satuan:%)	NA	16,67		33,33		50,00				-	
				Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju UHC (Dengan Satuan:%)	89,35	98		98		98		0		-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)		4357	24.000.000	4357	50.000.000	4357	24.000.000		98.000.000	Sub Koordinator kesehatan keluarga dan gizi	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)		927	22.000.000	927	50.000.000	927	22.000.000		94.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)		4162	23.000.000	4162	50.000.000	4162	23.000.000		96.000.000	Sub Koordinator kesehatan keluarga dan gizi	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)		18124	22.000.000	18124	50.000.000	18124	22.000.000		94.000.000	Sub Koordinator kesehatan keluarga dan gizi	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)		12677	23.000.000	12677	50.000.000	12677	23.000.000		96.000.000	Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	144163	144528	10.000.000	147419	50.000.000	150367	10.000.000		70.000.000	Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)		16103	24.000.000	16103	50.000.000	16103	24.000.000		98.000.000	Sub Koordinator kesehatan keluarga dan gizi	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	40118	40920	10.000.000	41739	50.000.000	42574	10.000.000		70.000.000	Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	5306	5412	5.000.000	5520	50.000.000	5631	5.000.000		60.000.000	Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	411	411	20.000.000	411	50.000.000	411	20.000.000		90.000.000	Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)		6385	10.000.000	6385	55.000.000	6385	10.000.000		75.000.000	Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit menular	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	6677	6811	400.000.000	6947	450.000.000	7086	400.000.000		1.250.000.000	Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit menular	K o t a Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dengan Satuan:Dokumen)			500.000		500.000		500.000		1.500.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)		1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000		72.000.000	Sub Koordinator kesehatan keluarga dan gizi	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dengan Satuan:Dokumen)		2	22.000.000	2	22.000.000	2	22.000.000		66.000.000	Sub Koordinator kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dengan Satuan:Dokumen)		1	28.000.000	1	28.000.000	1	28.000.000		84.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)		2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000		72.000.000	Sub Koordinator promosi dan pemerdayaan masyarakat	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dengan Satuan:Dokumen)		7	15.000.000	7	15.210.000	7	15.488.343		45.698.343	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		3.000.000	Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (Dengan Satuan:Dokumen)		1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000		3.300.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)		2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000		120.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dengan Satuan:Dokumen)		13	1.000.000	13	1.000.000	13	1.000.000		3.000.000	Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit menular	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)		5	10.856.648.800	5	10.856.648.800	5	10.856.648.800		32.569.946.400	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Dengan Satuan:Orang)	450	450	9.000.000	450	9.000.000	450	9.000.000		27.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Dengan Satuan:Paket)		1	500.000	1	500.000	1	5.000.000		6.000.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dengan Satuan:Dokumen)		4	23.000.000	4	23.000.000	4	23.000.000		69.000.000	Sub Koordinator kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Dengan Satuan:Unit)			500.000		500.000		500.000		1.500.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dengan Satuan:Dokumen)		4	2.000.000.000	4	2.000.000.000	4	4.712.331.111		8.712.331.111	RSUD Depati Hamzah.	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dengan Satuan:Dokumen)		36	18.665.337.000	36	18.926.651.718	36	21.985.340.555		59.577.329.273	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dengan Satuan:Dokumen)		4	1.807.071.500	4	1.807.071.500	4	4.519.402.612		8.133.545.612	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit)		-	163.100.000	-	165.383.400	-	168.409.916		496.893.316	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Dengan Satuan:Laporan)		2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000		7.500.000	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Dengan Satuan:Unit)		-	32.127.324	-	32.577.107	-	33.173.267		97.877.698	-	K o t a Pangkal Pinang
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (Dengan Satuan:%)	0	100	20.500.000	100	20.780.000	100	21.151.124	0	62.431.124	-	
		1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)		20	15.000.000	20	15.210.000	20	15.488.343		45.698.343	-	
		1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)		9	5.000.000	9	5.070.000	9	5.162.781		15.232.781	-	K o t a Pangkal Pinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)		-	500.000	-	500.000	-	500.000		1.500.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	0	100	230.500.000	100	238.517.000	100	247.515.862	0	716.532.862	-	
		1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)			210.000.000		212.940.000		216.836.802		639.776.802	-	
		1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Dengan Satuan:Unit)		7	3.000.000	7	3.042.000	7	3.097.669		9.139.669	-	Kota Pangkal Pinang
		1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Dengan Satuan:Unit)		9	15.000.000	9	20.000.000	9	25.000.000		60.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dengan Satuan:Dokumen)		1	2.500.000	1	2.535.000	1	2.581.391		7.616.391	-	Kota Pangkal Pinang
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan SDM Kesehatan sesuai standar Bidang PSDK (Dengan Satuan:%)	NA	50	46.900.000	50	47.556.600	50	48.426.886	50	142.883.486	-	
				Capaian profesionalitas SDM Kesehatan di RSUD Depati Hamzah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		RSUD Depati Hamzah	
		1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				0		0		0		0	-	
		1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)			0		0		0		0	-	
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunya laporan pembinaan dan pengawasan sumberdaya kesehatan RSUD (Dengan Satuan:%)	0	100	46.900.000	100	47.556.600	100	48.426.886	0	142.883.486	Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit menular	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	NA	50		50		50		0		Sub Koordinator sumber daya manusia kesehatan	
	1.02.03.2.02.01		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)			0		0		0		0	-	
	1.02.03.2.02.02		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Dengan Satuan:Orang)		5	23.500.000		23.829.000		24.265.071		71.594.071	Sub Koordinator sumber daya manusia kesehatan	Kota Pangkal Pinang
	1.02.03.2.02.03		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)		8	23.400.000	8	23.727.600	8	24.161.815		71.289.415	Sub Koordinator sumber daya manusia kesehatan	Kota Pangkal Pinang
	1.02.03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0	-	
	1.02.03.2.03.01		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Dengan Satuan:Orang)			0		0		0		0	-	
	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pembinaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian dan PIRT (Dengan Satuan:%)	NA	22	505.000.000	25	521.790.000	27	540.809.757	27	1.567.599.757	-	
				Persentase sarana sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat (Dengan Satuan:%)	NA	98		99		99		99		-	
	1.02.04.2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dengan Satuan:%)	0	100	20.000.000	100	30.000.000	100	40.000.000	0	90.000.000	Sub Koordinator kefarmasian dan alat kesehatan	
	1.02.04.2.01.01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dengan Satuan:Dokumen)		3	10.000.000	3	15.000.000	3	20.000.000		45.000.000	Sub Koordinator kefarmasian dan alat kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dengan Satuan:Sarana)		130	10.000.000	130	15.000.000	130	20.000.000		45.000.000	-	Kota Pangkal Pinang
		1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dengan Satuan:%)	0	100	0	100	0	100	0	0	0	Sub Koordinator kefarmasian dan alat kesehatan	
		1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dengan Satuan:Dokumen)		1	0	1	0	1	0		0	Sub Koordinator kefarmasian dan alat kesehatan	
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				450.000.000		456.300.000		464.650.290		1.370.950.290	-	
		1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dengan Satuan:Dokumen)			450.000.000		456.300.000		464.650.290		1.370.950.290	-	
		1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dengan Satuan:%)	0	100	30.000.000	100	30.420.000	100	30.976.686	0	91.396.686	Sub Koordinator kefarmasian dan alat kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dengan Satuan:Dokumen)		1	30.000.000	1	30.420.000	1	30.976.686		91.396.686	-	
		1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dengan Satuan:%)	0	100	5.000.000	100	5.070.000	100	5.182.781	0	15.252.781	Sub Koordinator kefarmasian dan alat kesehatan	
		1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dengan Satuan:Dokumen)		1	5.000.000	1	5.070.000	1	5.182.781		15.252.781	Sub Koordinator kefarmasian dan alat kesehatan	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% Posyandu Aktif (Dengan Satuan:%)	56,7	68,38	278.000.000	74,36	278.000.000	80,34	278.000.000	80,34	834.000.000	-	
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya laporan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	0	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	0	72.000.000	-	
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)		3	24.000.000	3	24.000.000	3	24.000.000		72.000.000	Sub Koordinator promosi dan pemerdayaan masyarakat	
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	0	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	0	72.000.000	Sub Koordinator promosi dan pemerdayaan masyarakat	
		1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dengan Satuan:Dokumen)		4	24.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000		72.000.000	Sub Koordinator promosi dan pemerdayaan masyarakat	
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	0	100	230.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	0	690.000.000	Sub Koordinator promosi dan pemerdayaan masyarakat	
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dengan Satuan:Dokumen)		1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000		690.000.000	Sub Koordinator promosi dan pemerdayaan masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
TOTAL:						245.961.757.158		248.533.708.756		253.105.660.354		747.601.126.268			
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG 															

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAKAN URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung merefleksikan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD/2022	Target Kinerja dan Krangka Pendanaan			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode-PD
						Target			
						2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Usia Harapan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,02	75,10	75,15	75,20	75,20
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	90,18	90,20	90,22	90,24	90,24
		Terwujudnya kepuasan internal perangkat daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	90,18	90,20	90,22	90,24	90,24
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%		100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pelayanan ibu bersalin yang sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan persalianan sesuai standar	%		100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan persalianan sesuai standar	%		100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pelayanan kesehatan balita yang sesuai standar	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		100%	100%	100%	100%
		terlaksananya skrining kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%		100%	100%	100%	100%

		Terpenuhinya Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	%		100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	%		100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	%		100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	%		100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pelayanan orang terduga TB sesuai standard	Terlaksananya pelayanan orang terduga TB sesuai standard	%	105%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard	Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard	%		100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	%		100%	100%	100%	100%

		Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Depati Hamzah	%	83,78	90%	91%	92%	92%
			Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	%	71	77%	85%	100%	100%
			Persentase pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik di RSUD Depati Hamzah sesuai standar	%	100	100	100	100	100
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100
		Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Wasting (gizi kurang dan gizi buruk)	%	1%	0,9 %	0,8%	0,7%	0,7%
		Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana air minum yang diawasi/ yang diperiksa sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standard	%	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai std	%	100%	100	100	100	100
		Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang menerapkan GERMAS	%	100%	100%	100%	100%	100%

		Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD	%	100	100	100	100	100
			Cakupan deteksi dini penyakit Hepatitis B	%	81%	82%	83%	85%	85%
		Terpenuhinya Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard	Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard	%		100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	prevalensi HIV/AIDS	%	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0037
		Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kelurahan UCI	%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kejadian Malaria	per 1000	0,008	<1	<1	<1	<1
		Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi <24 Jam	%	100	100	100	100	100
		Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penemuan orang dengan NAPZA	%	0	0	0	0	0
		Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Integrasi Sistem Informasi Kesehatan	%		100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Persentase Puskesmas yang sesuai standard	%		80	100	100	100

		Masyarakat							
		Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	%		80	100	100	100
		Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas dengan alat kesehatan terkalibrasi	%	80%	90	90	90	90
		Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya program UHC	%		98%	98%	98%	98%
		Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda	per 100.000 Penduduk		86	86	86	86
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terwujudnya SDM Kesehatan yang profesional dan kompeten	Capaian profesionalitas SDM Kesehatan di RSUD Depati Hamzah	%	100	100	100	100	100
		Terwujudnya SDM Kesehatan yang profesional dan kompeten	Cakupan SDM Kesehatan sesuai standar	%	N/A	50%	50%	50%	50%
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terpenuhinya sarana prasarana farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi persyaratan sesuai standar kesehatan	Persentase pembinaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian dan PIRT	%		22%	25%	27%	27%
			Persentase sarana sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	%		98%	99%	99%	99%

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% Posyandu Aktif	%	56,7%	68,38	74,36	80,34	80,34
--	---	---	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan

pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pangkalpinang, Maret 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PANGKALPINANG,



Dr. dr. H. Masagus Hakim, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19720828 200212 1 005